

PENGARUH INFLASI, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANWIL DJP SULSELBARTRA

Indah Permatasari^{1*}, M. Ridwan Tikollah²⁾ Samirah Dunakhir³⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: indhpermatasari@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: m.ridwan.tikollah@unm.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: samirah.dunakhir@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Inflation, Number of Taxable Entrepreneurs (PKP), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on Value Added Tax (VAT) Revenue. The variables used in this study are Inflation (X1), Number of PKP (X2), GRDP (X3), and VAT Revenue (Y). The population in this study is all regional data related to the VAT Revenue and Number of PKP variables obtained from the Tax Service Office (KPP) in the Sulsebartra DJP Regional Office, as well as Inflation and Gross Regional Domestic Product (GRDP) data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of the Province in the Sulsebartra region for the period 2020 to 2024. The research sample includes data from 8 Regencies/Cities in the Sulsebartra region selected based on the Purposive Sampling technique. This research is quantitative research with data collection carried out using documentation techniques. Data analysis was conducted using classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing with the help of the SPSS version 25 program. The results of the study indicate that partially, the Number of PKP and GRDP have a positive and significant effect on VAT Revenue, while Inflation has no significant effect on VAT Revenue. Simultaneously, the three variables have a positive and significant effect on VAT Revenue. Furthermore, the Number of PKP is identified as the most dominant factor influencing VAT Revenue in the Sulsebartra region. This research highlights that VAT optimization in the Sulsebartra region depends more on administrative expansion (PKP) and regional economic productivity (GRDP) than on price fluctuations (Inflation). Therefore, tax authorities should prioritize the digitalization of PKP registration and strengthen supervision of business actors in strategic sectors to ensure a sustainable increase in tax revenue amidst regional economic growth.

Keywords: *Inflation, Number of Taxable Entrepreneurs, Regional Gross Domestic Product, Value Added Tax Revenue*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Inflasi, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data regional yang berkaitan dengan variabel Penerimaan PPN dan Jumlah PKP yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kanwil DJP Sulsebartra, serta data Inflasi dan PDRB yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi di wilayah Sulsebartra selama periode tahun 2020 hingga 2024. Sampel penelitian meliputi data dari 8 Kabupaten/Kota di wilayah Sulsebartra yang dipilih berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, Jumlah PKP dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN. Lebih lanjut, variabel Jumlah PKP ditemukan sebagai faktor yang paling dominan dalam memengaruhi Penerimaan PPN di wilayah Sulsebartra. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi PPN di wilayah Sulsebartra lebih bergantung pada perluasan basis administratif (PKP) dan produktivitas ekonomi daerah (PDRB) dibandingkan fluktuasi harga (Inflasi). Oleh karena itu, otoritas pajak perlu memprioritaskan digitalisasi pendaftaran PKP serta penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor strategis guna menjamin keberlanjutan penerimaan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi regional.

Kata Kunci: Inflasi, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Produk Domestik Regional Bruto, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

*Corresponding author. E-mail: indhpermatasari@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemandirian suatu negara merupakan perwujudan dari kemampuan negara dalam membiayai kelangsungan pembangunan. Dalam rangka merealisasikan pembangunan yang merata, salah satu usaha yang dilakukan negara yakni mendorong kontribusi sektor pajak dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan kebutuhan fiskal yang didanai melalui modal di lingkup nasional. Sebagai sumber pendapatan terbesar, pajak menjadi instrumen utama untuk membiayai kebutuhan operasional negara dan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Dengan demikian, keberadaan pajak menjadi esensial dalam upaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara (Tjahyono, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan setoran wajib kepada negara yang dilakukan baik oleh individu maupun badan usaha, dimana pembayarannya bersifat mengikat tanpa adanya imbalan langsung bagi pembayar pajak dan dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk kebutuhan negara demi memaksimalkan kemakmuran rakyat. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan mengalami keterbatasan dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Lebih dari itu, pajak juga berperan dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi melalui redistribusi pendapatan serta pengelolaan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang mencerminkan kapasitas fiskal negara.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik terkait realisasi pendapatan negara dari tahun 2020 hingga 2024, Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN secara konsisten menjadi penyumbang utama bagi penerimaan negara. Meskipun penerimaan PPN berada di posisi kedua setelah PPh, namun penerimaan PPN menyumbang kontribusi mencapai 33-35 persen dari total penerimaan pajak dan 26-28 persen dari total penerimaan negara. Menurut Mardiasmo (2023), PPN merupakan pajak yang dibebankan atas pembelian barang dan penggunaan jasa di dalam wilayah domestik.

PPN sangat tergantung pada aktivitas konsumsi masyarakat sehingga semakin besar konsumsi masyarakat maka semakin besar penerimaannya. Besaran PPN ditetapkan dari hasil perkalian antara tarif pajak yang berlaku dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Penerimaan PPN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi makroekonomi maupun kebijakan perpajakan seperti inflasi, jumlah PKP, dan PDRB. (Wijayanti & Budi, 2017).

Faktor pertama adalah inflasi, yaitu kondisi peningkatan berkelanjutan pada harga-harga umum barang dan jasa selama rentang waktu tertentu (Hasyim, 2017). Inflasi diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merefleksikan fluktuasi harga rata-rata pada berbagai jenis layanan dan produk yang dikonsumsi masyarakat. Karena PPN dibebankan pada transaksi konsumsi, kondisinya sangat terkait dengan perekonomian umum. Oleh karena itu, inflasi berpotensi memengaruhi konsistensi penerimaan PPN dari tahun ke tahun. Inflasi yang tinggi cenderung melemahkan daya beli publik yang dapat menekan turun pengeluaran dan membatasi tingkat konsumsi dan berpotensi mengurangi basis objek pajak, termasuk PPN, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak tersebut.

Faktor selanjutnya merupakan adalah PKP yang menjadi komponen kunci dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dalam implementasi PPN. Menurut Mardiasmo (2023) PKP merujuk pada individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan wajib memungut, menyetorkan, serta melaporkan PPN mengikuti aturan perundang-undangan. Jumlah PKP mencerminkan besarnya basis pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan PPN. Semakin banyak PKP yang terdaftar dan aktif, semakin besar pula potensi penerimaan PPN yang bisa diperoleh pemerintah.

Faktor lain yang berdampak pada penerimaan PPN adalah PDRB, yang dipaparkan sebagai keseluruhan Nilai agregat pasar dari produksi barang ataupun jasa pada suatu daerah dalam periode waktu yang spesifik. PDRB diukur melalui dua pendekatan, yaitu harga berlaku (nominal) dan harga konstan (riil). Daerah

dengan PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kapasitas produksi dan konsumsi yang besar, yang secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak, termasuk PPN. Daerah dengan PDRB tinggi juga cenderung memiliki infrastruktur yang lebih baik dan daya beli masyarakat yang lebih kuat, yang semakin memperkuat potensi penerimaan pajak.

Tantangan seperti fluktuasi inflasi, jumlah PKP yang belum optimal, dan PDRB yang bervariasi menjadi hambatan dalam mencapai target penerimaan PPN. Fluktuasi inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan pola konsumsi, sehingga berdampak pada jumlah transaksi kena pajak. Pertumbuhan PDRB yang tidak merata juga memengaruhi aktivitas ekonomi di setiap daerah. Selain itu, jumlah PKP yang belum optimal, akibat rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pengawasan, atau kendala administrasi, membatasi potensi pemungutan PPN. Ketiga tantangan ini saling

terkait, sehingga diperlukan strategi dalam pengendalian inflasi, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan jumlah PKP untuk mengoptimalkan penerimaan PPN.

Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara memiliki perbedaan dalam struktur ekonomi yang terbentuk dari faktor geografis, sumber daya alam yang dimiliki, serta kebijakan pembangunan yang diterapkan di masing-masing wilayah, sehingga tingkat aktivitas ekonomi di setiap daerah tidak selalu mendukung peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulselbartra perlu berperan strategis dalam mengelola penerimaan PPN, dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, peningkatan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha lokal dapat mendukung pencapaian target penerimaan yang optimal.

Tabel 1. Data Inflasi (%), Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah), dan Penerimaan PPN (Miliar Rupiah) Daerah Sulselbartra Tahun 2020-2024

Tahun	Inflasi (%)	Jumlah PKP	PDRB (Miliar Rupiah)	Penerimaan PPN (Miliar Rupiah)
2020	8,23	1108	193.223,23	3.886.198,50
2021	9,38	1386	201.875,53	4.625.672,94
2022	14,94	1702	212.378,74	6.428.446,51
2023	6,82	1877	222.441,49	7.282.372,14
2024	3,74	1795	238.520,51	6.774.255,51

Sumber: Situs BPS dan DJP Sulselbartra (2025)

Berdasarkan Tabel 1, penerimaan PPN dan PDRB menunjukkan pertumbuhan yang konsisten di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara selama periode 2020-2024. Meskipun pandemi pada tahun 2020 sempat memberikan dampak signifikan yang memengaruhi peningkatan inflasi, pertumbuhan PDRB yang melambat, dan jumlah PKP terdaftar lebih sedikit dari tahun sebelumnya karena berdasarkan penelitian Dunakhir & Idrus (2021), kinerja profitabilitas beberapa perusahaan jasa ataupun perdagangan di Indonesia menurun akibat dampak dari pandemi, namun penerimaan PPN tetap menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut

terus terdorong seiring dengan upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi, salah satunya adalah penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen yang berlaku sejak April 2022. Jumlah PKP yang terdaftar kembali meningkat dari tahun ke tahun dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi dan produksi, yang pada gilirannya meningkatkan PDRB. Sementara itu, tingkat inflasi selama 5 tahun tersebut mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi hingga perubahan pola konsumsi.

Penelitian di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara akan memberikan kontribusi baru

yang berbeda secara substansial dari studi di wilayah Jawa atau Sumatera. Dikarenakan wilayah ini memiliki keunikan berupa struktur ekonomi berbasis komoditas unggulan yang sangat reaktif terhadap fluktuasi harga global dan inflasi daerah. Selain itu, wilayah Sulselbartra memiliki disparitas infrastruktur ekonomi yang lebar antar kabupaten/kota, yang memengaruhi kemampuan penyerapan PKP baru dibandingkan wilayah industri yang sudah mapan. Pergeseran tarif PPN menjadi 11% pada tahun 2022 di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi di wilayah dengan karakter geografis kepulauan dan agraris seperti Sulselbartra, menjadi urgensi tersendiri untuk diteliti guna melihat apakah faktor makro seperti Inflasi dan PDRB atau faktor administratif seperti Jumlah PKP yang lebih dominan dalam mendorong penerimaan PPN di wilayah ini.

Banyak penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi pengaruh inflasi, jumlah PKP, dan PDRB terhadap penerimaan PPN. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pahala dan Muslih (2020) yang menyimpulkan PDRB dan inflasi secara parsial terbukti memberikan dampak positif pada capaian Penerimaan PPN. Sedangkan jumlah PKP tidak terbukti memberikan dampak pada capaian Penerimaan PPN. Kondisi ini selaras dengan hasil observasi oleh Wulandari dan Yulianti (2023) menyimpulkan variabel Inflasi secara parsial memiliki dampak positif dan signifikan terhadap capaian Penerimaan PPN, Jumlah PKP secara parsial tidak berdampak terhadap capaian Penerimaan PPN, Kemudian secara simultan, Inflasi dan Jumlah PKP mempunyai dampak pada capaian Penerimaan PPN. Adapun studi terdahulu yang disusun oleh Renata et al. (2016) menyimpulkan bahwa variabel inflasi, jumlah PKP, dan PDRB berdampak secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Meskipun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, jumlah PKP, dan PDRB dapat mempengaruhi penerimaan PPN dan ada juga temuan yang menyatakan sebaliknya. Adanya perbedaan dari hasil penelitian tersebut menimbulkan *Research Gap* antara penelitian satu dan lainnya. Inkonsistensi hasil penelitian, seperti yang terlihat pada pengaruh jumlah PKP terhadap PPN di mana beberapa studi

menunjukkan pengaruh signifikan sementara yang lain bersumber dari hal yang tidak disertakan dalam analisis. Perbedaan periode waktu dan lokasi penelitian bisa menjadi penyebab utama, mengingat variasi kondisi ekonomi dan kebijakan di setiap daerah serta waktu. Selain itu, variasi dalam metodologi penelitian, seperti teknik analisis juga dapat menghasilkan temuan yang berbeda. Terakhir, karakteristik spesifik sampel atau populasi yang diteliti, termasuk konsentrasi sektor industri atau tingkat kepatuhan pajak di suatu wilayah, turut memengaruhi hasil.

Adanya keberagaman hasil temuan menggarisbawahi perlunya studi dengan cakupan yang lebih luas untuk membedah elemen-elemen yang memengaruhi fenomena tersebut. Sehingga mengacu pada paparan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis kembali ketiga variabel dengan mengangkat judul Pengaruh Inflasi, Jumlah PKP, dan PDRB terhadap Penerimaan PPN pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Ekonomi Keynes (*Keynesian Theory*)

Teori Ekonomi Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes (1936) memberikan perhatian besar terhadap peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Dalam pandangan ini, penerimaan pajak adalah instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan permintaan agregat dan menstabilkan ekonomi, bukan hanya untuk mengumpulkan pendapatan. Teori keynesian meyakini bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, terutama dalam resesi, di mana pajak dapat diturunkan untuk mendorong permintaan agregat. Dalam teori ini indikator makroekonomi seperti Inflasi dan PDRB menjadi pembahasan penting. Keduanya tidak hanya menjadi indikator kesehatan ekonomi nasional tetapi juga sangat menentukan kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Peningkatan PDRB yang menandakan pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan aktivitas produksi, pendapatan, dan konsumsi, sehingga

memperluas basis pajak dan secara langsung meningkatkan penerimaan pajak (termasuk PPN).

Sebaliknya, stabilitas inflasi berpotensi mendorong perolehan pajak secara nominal, mengingat kenaikan harga secara otomatis memperluas basis pengenaan PPN. Namun, ketidakstabilan inflasi justru berpotensi menyusutkan perolehan PPN melalui mekanisme penurunan daya serap pasar dan tingkat konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka Keynesian, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang stabil sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak (Oktaviani, Syafitri, & Munandar, 2024).

Model Kepatuhan Pajak Fischer (Fischer's Model of Tax Compliance)

Model Kepatuhan Pajak Fischer dikembangkan oleh Fischer et al. (1992) dengan menggabungkan faktor ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Model ini menjelaskan variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung digolongkan ke dalam empat kategori. Pertama, *Noncompliance Opportunity* (Peluang Untuk Tidak Patuh) yang merupakan pendidikan, *Take Home Pay*, sumber pendapatan, dan pekerjaan. Kedua, *Attitude and Perception* (Sikap dan Persepsi) yang merupakan etika, keadilan pajak, sistem dan pengaruh rekan sejawat. Ketiga, *Tax System Structure* (Struktur Sistem Perpajakan) yang merupakan tarif pajak, denda, kemungkinan deteksi, kompleksitas sistem perpajakan. Keempat, *Demographic Variable* (Faktor Demografi) yang merupakan gender dan usia.

Dalam pandangan Fischer terkait kepatuhan pajak, kondisi ekonomi makro seperti inflasi yang tinggi atau pertumbuhan PDRB masuk ke dalam kategori tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap beban pajak mereka. Ketika inflasi meningkat hal ini mengakibatkan daya beli menurun, yang kemudian memicu ketidakpatuhan karena beban ekonomi riil yang dirasakan meningkat. Sebaliknya, pertumbuhan PDRB mencerminkan peningkatan kemampuan

ekonomi yang dapat meningkatkan kepatuhan melalui peningkatan penghasilan.

Dalam konteks perpajakan, PKP berkaitan erat dengan kategori Struktur Sistem Perpajakan serta kategori Sikap dan Persepsi, dimana Wajib Pajak yang patuh tidak hanya melihat PKP sebagai perintah undang-undang, tetapi sebagai refleksi dari identitas mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dengan kesadaran moral yang tinggi, Wajib Pajak cenderung mengupayakan kepatuhan sukarela, bahkan di tengah tantangan kompleksitas sistem maupun besaran tarif yang ada. Seiring meningkatnya jumlah PKP yang patuh, penerimaan pajak negara juga akan meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya mencerminkan kesadaran hukum para pengusaha, tetapi juga efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong kepatuhan melalui edukasi dan sistem administrasi yang modern. Dengan demikian, berdasarkan Model Kepatuhan Pajak Fischer, efektivitas penguatan PKP akan mempersempit ruang untuk penghindaran pajak, sehingga secara teoritis akan meningkatkan penerimaan PPN, sehingga strategi untuk meningkatkan jumlah PKP harus mencakup regulasi dan penguatan nilai kepatuhan (Diansyah, Fadhlilih, Rahmalia, & Fatriansyah, 2023).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan PPN adalah pemasukan negara yang berasal dari pengenaan PPN dalam cakupan batas-batas teritorial pabean. Penerimaan dari PPN meningkatkan daya saing negara dan menopang pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Penerimaan PPN memiliki peran vital merepresentasikan aktivitas ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Dengan penerimaan PPN yang optimal, pemerintah dapat membiayai berbagai penyelenggaraan agenda pembangunan bagi masyarakat. Langkah ini turut berperan dalam merawat stabilitas makroekonomi melalui kepastian partisipasi seluruh entitas bisnis dalam sistem perpajakan (Salsabilah, 2024).

Inflasi

Inflasi adalah tren kenaikan harga pada beragam produk dan layanan yang berlangsung secara

menyeluruh dan persisten dalam kurun waktu panjang, dan bisa mengakibatkan nilai uang menjadi turun. Menurut Salim & Fadilla (2021), inflasi adalah fenomena peningkatan harga-harga komoditas yang diakibatkan oleh beberapa pemicu, yang kemudian berpotensi mendorong kenaikan harga barang-barang lainnya secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa banyaknya uang beredar di masyarakat, harga pasar yang secara sepihak, hingga banyaknya permintaan.

Inflasi menurut Hasyim (2017) merujuk pada kondisi tren harga rata-rata yang terus naik secara menyeluruh dan berlangsung secara terus-menerus. Sejalan dengan itu, Boediono (2015) menekankan bahwa kenaikan harga pada beberapa barang atau jasa yang bersifat sementara tidak dikategorikan sebagai inflasi, dengan pengecualian apabila fenomena tersebut meluas atau berimbas pada kenaikan harga komoditas lainnya. Kesimpulan yang bisa ditarik dari kedua pengertian tersebut yakni inflasi adalah keadaan dimana terjadi eskalasi harga dari beragam produk dan layanan dalam waktu yang tidak singkat dan berimbas pada eskalasi harga secara menyeluruh.

Pengusaha Kena Pajak

Menurut Setyawan (2021), pengusaha merupakan individu atau badan usaha dalam berbagai bentuk yang dalam aktivitasnya menghasilkan, mengimpor, mengekspor, dan melakukan perdagangan. Sementara itu, Mardiasmo (2023) mendefinisikan PKP sebagai entitas usaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak sesuai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dengan pengecualian untuk pengusaha kecil. Mengacu pada pengertian tersebut, disimpulkan bahwa PKP adalah pengusaha yang merupakan WP dan memiliki kewajiban perpajakan untuk melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada siapapun dan dikenakan PPN.

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk mengamati perkembangan ekonomi suatu daerah. Hasyim (2017) mendefinisikan PDRB sebagai

akumulasi hasil produksi entitas ekonomi pada lingkup regional dalam satu siklus kalender. Senada dengan penjelasan tersebut, Munandar & Wardoyo (2015) menjelaskan bahwa PDRB merupakan nilai output bersih dari seluruh aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi suatu wilayah selama rentang waktu yang spesifik, umumnya adalah satu tahun kalender.

PDRB juga didefinisikan sebagai akumulasi nilai tambah yang dikontribusikan oleh seluruh lapangan usaha dalam batasan geografis regional selama periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, PDRB didefinisikan sebagai keseluruhan nilai moneter dari output ekonomi yang diciptakan oleh berbagai lapangan usaha di tingkat regional dalam satu siklus kalender.

Inflasi dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa yang dikenakan PPN juga naik, yang berpotensi meningkatkan penerimaan PPN. Namun, inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, dan berujung pada konsekuensi negatif penerimaan PPN.

Mengacu pada paparan sebelumnya, peneliti mengasumsikan inflasi secara signifikan mempengaruhi penerimaan PPN. Temuan dalam studi ini sejalan dengan hasil observasi terdahulu oleh Asiah et. al (2023) yang menjelaskan bahwa tingkat inflasi mempengaruhi penerimaan PPN.

H1: Variabel Inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Jumlah PKP menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang memegang tanggung jawab administratif untuk melakukan pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan PPN ke kas negara. Jumlah PKP yang besar menunjukkan potensi Penerimaan PPN yang lebih besar juga, karena lebih banyak transaksi yang dikenakan pajak. Mengacu pada paparan sebelumnya, peneliti mengasumsikan jumlah PKP secara signifikan mempengaruhi penerimaan PPN. Temuan dalam studi ini sejalan dengan hasil observasi

terdahulu oleh Renata et. al (2016) yang menjelaskan bahwa semakin banyak PKP, maka semakin besar basis pengenaan PPN.

H2: Variabel Jumlah PKP secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

Produk Domestik Regional Bruto dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

PDRB mencerminkan akumulasi volume ekonomi yang berasal dari aktivitas produksi di sebuah wilayah terangkum dalam nilai PDRB. Peningkatan PDRB mencerminkan adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan yang biasanya diikuti dengan peningkatan konsumsi dan produksi barang serta jasa yang dikenakan PPN. Mengacu pada paparan sebelumnya, peneliti mengasumsikan PDRB secara signifikan mempengaruhi penerimaan PPN. Temuan dalam studi ini sejalan dengan hasil observasi terdahulu oleh Pahala dan Muslih (2020) yang menjelaskan bahwa besaran pola konsumsi serta kondisi finansial masyarakat berimplikasi pada eskalasi nilai PDRB dan berujung menambah penerimaan pajak.

H3: Variabel PDRB secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

Inflasi, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Produk Domestik Regional Bruto, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Inflasi, jumlah PKP, dan PDRB merupakan variabel yang saling berkaitan dalam memengaruhi penerimaan PPN. Keterkaitan antara faktor merupakan hal yang sangat krusial untuk dicermati. Meskipun jumlah PKP tinggi, jika daya beli masyarakat menurun akibat inflasi, penerimaan PPN tetap berisiko mengalami penurunan. Sebaliknya, kondisi makroekonomi yang stabil dan pertumbuhan PDRB yang baik akan lebih optimal jika didukung oleh peningkatan jumlah PKP. Oleh karena itu, upaya meningkatkan jumlah PKP perlu diimbangi dengan menjaga stabilitas ekonomi untuk memaksimalkan penerimaan PPN.

Mengacu pada paparan sebelumnya, peneliti mengasumsikan bahwa inflasi, jumlah PKP, dan PDRB secara signifikan mempengaruhi penerimaan PPN. Temuan dalam studi ini

sejalan dengan hasil observasi terdahulu oleh (Asiah, Yahya, Fuadi, & Khasanah, 2023; Pahala & Muslih, 2020; Renata, Hidayat, & Kaniskha, 2016) yang menjelaskan bahwa inflasi, jumlah PKP, dan PDRB secara signifikan mempengaruhi penerimaan PPN.

H4: Variabel Inflasi, Jumlah PKP, dan PDRB secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

Dominansi Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dominansi Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN terletak pada peran PKP sebagai basis pemungut pajak. PPN adalah pajak atas konsumsi yang dipungut pada setiap penyerahan barang dan jasa oleh PKP. Semakin banyak jumlah entitas yang dikukuhkan sebagai PKP dan secara sadar menjalankan kewajibannya untuk pemungut PPN, maka secara struktural dapat memberikan semakin banyak kontribusi bahkan mendominasi dalam menentukan total Penerimaan PPN.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa jumlah PKP lebih dominan dalam mempengaruhi penerimaan PPN. Temuan dalam studi ini sejalan dengan hasil observasi terdahulu oleh (Renata et al., 2016; Sinambela & Rahmawati, 2019; Yulianingtyas, 2018) yang memperlihatkan bahwa jumlah PKP secara dominan mempengaruhi penerimaan PPN.

H5: Variabel Jumlah PKP secara berpengaruh dominan terhadap penerimaan PPN

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dari Kanwil DJP Sulselbartra dan Badan Pusat Statistik (BPS) (<https://www.bps.go.id>). Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen yang dianalisis hubungannya terhadap satu variabel dependen. Adapun populasi penelitian terdiri atas dua kelompok data, yaitu seluruh KPP yang beroperasi di dalam lingkup otoritas kewilayahan Kanwil DJP Sulselbartra sebagai populasi untuk variabel jumlah PKP dan penerimaan PPN, serta data yang bersumber

dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai populasi untuk variabel inflasi dan PDRB.

Dari populasi KPP tersebut, dipilih 8 KPP sebagai sampel dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan kriteria spesifik yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Wilayah KPP memiliki ketersediaan data Penerimaan PPN tahun 2020-2024, (2) Wilayah KPP memiliki ketersediaan data Inflasi di situs BPS tahun 2020-2024, (3) Wilayah KPP memiliki ketersediaan data Jumlah PKP tahun 2020-2024, dan (4) Wilayah KPP memiliki ketersediaan data PDRB di situs BPS tahun 2020-2024.

Dalam pemilihan sampel, KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) tidak disertakan karena KP2KP

secara administratif berada di bawah koordinasi KPP Pratama dan tidak mengelola pelaporan pajak secara mandiri dalam hal pembukuan penerimaan regional yang terintegrasi di sistem DJP. Sehingga data dari KPP Pratama dianggap telah mencakup seluruh aktivitas ekonomi di wilayah kerja KP2KP yang berada di bawahnya. Selanjutnya, dilakukan transformasi data ke dalam bentuk Logaritma Natural (Ln) pada variabel Penerimaan PPN, Jumlah PKP, dan PDRB untuk menyamakan perbedaan satuan dari persentase pada Inflasi dengan nominal triliun pada PDRB dan PPN. Data diuji dengan pengujian prasyarat statistik yang dikenal uji asumsi klasik, kemudian pengaruh antara variabel diuji dengan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis untuk pengaruh parsial, simultan, dan dominan.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala Ukur
1	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Total PPN yang berhasil dikumpulkan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sulselbartra) dalam periode waktu tertentu (bulan atau tahun)	Diukur dalam satuan miliar rupiah per tahun	Rasio
2	Inflasi	Tingkat perubahan harga barang dan jasa yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama	Diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK)	Rasio
3	Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Total entitas bisnis yang telah dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN	Diukur dalam angka absolut pada periode tertentu (bulan atau tahun)	Rasio
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu kawasan yang terjadi dalam jangka panjang, biasanya dalam kurun waktu setahun	Diukur menggunakan dasar harga konstan per tahun dalam satuan miliar rupiah	Rasio

Sumber: Data diolah (2026)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk memenuhi syarat penggunaan model regresi linier berganda, pengujian asumsi klasik ditempuh untuk memverifikasi bahwa model regresi telah memenuhi kriteria kelayakan statistik yang dipersyaratkan, sehingga model tersebut dapat dianggap sebagai alat prediksi

yang akurat, tidak bias, dan konsisten. Pengujian ini dilakukan setelah perhitungan regresi berganda selesai menggunakan perangkat lunak SPSS for Windows. Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa data terdistribusi normal, dan terbebas dari gejala multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji			Kesimpulan
Normalitas	Asymp. Sig = 0,100			Data terdistribusi normal karena nilai sig > 0,05
Multikolinieritas	Variabel	Tolerance	VIF	Data terbebas dari masalah multikolinieritas, ditunjukkan dengan nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10
	Inflasi	0,97	1,031	
	Jumlah PKP	0,504	1,985	
	PDRB	0,496	2,017	
Heterokedastisitas	Variabel	Sig		Data terbebas dari gejala heteroskedastisitas dengan hasil uji glejser menunjukkan nilai sig > 0,05
	Inflasi	0,479		
		0,082		
	Jumlah PKP	0,471		
Autokorelasi	PDRB			Data terbebas dari autokorelasi, karena nilai du < DW < 4 – du
	DW=	dU=	4-du=	
	1,744	1,6589	2,3411	
		dL=1,3384		

Sumber: Data diolah (2026)

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	39
Asymp. Sig. (2-tailed)	.100 ^c

Sumber: Data diolah (2026)

Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi normalitas distribusi residual dan ditempuh melalui uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov guna memenuhi asumsi dasar regresi. Dikatakan data berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil pengujian normalitas disajikan dalam tabel dan penjelasan berikut ini: Berdasarkan pada tabel dapat dilihat hasil pengujian normalitas menerpakan pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* sebesar 0,100 yang mana ini lebih besar dari 0,05 ($0,100 > 0,05$). Sehingga disimpulkan bahwa secara statistik data yang digunakan terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinieritas

Uji ini untuk mendeteksi adanya keterikatan yang berlebihan atau hubungan linieritas antar-variabel independen dalam model. Apabila variabel-variabel bebas tidak saling terkait, maka model dianggap baik. Syarat utama agar

tidak terjadi multikolinieritas adalah nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) lebih kecil dari 10. Hasil dari pengujian tersebut selanjutnya akan disajikan dan dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF
1	INFLASI	0,970	1,031
	JUMLAH PKP	0,504	1,985
	PDRB	0,496	2,017

Sumber: Data diolah (2026)

Inflasi menghasilkan nilai toleransi 0,970, Jumlah PKP menghasilkan nilai toleransi 0,504, serta PDRB menghasilkan nilai toleransi 0,496. Ketiga nilai lebih besar dari 0,10. Selanjutnya, hasil memperlihatkan Inflasi menghasilkan nilai VIF 1,031, Jumlah PKP menghasilkan VIF 1,985, serta PDRB menghasilkan VIF 2,017, Ketiga nilai VIF ini lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki masalah gejala multikolonearilitas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a	
Model	Sig.
1 (Constant)	0,000
INFLASI	0,479
JUMLAH PKP	0,082
PDRB	0,471

Sumber: Data diolah (2026)

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk mengidentifikasi ketidakseragaman varians (keragaman penyebaran) residu antar pengamatan dalam model regresi. Penggunaan

metode menerapkan pengujian Glejser. Model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas (atau homoskedastisitas) apabila nilai signifikansi (p-value) dari setiap variabel bebas (independen) dalam Uji Glejser $> 0,05$. Hasil pengujian heterokedastisitas disajikan dalam tabel dan penjelasan berikut ini:

Berdasarkan pada tabel dapat dilihat hasil uji heterokedastisitas menunjukkan variabel Inflasi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,479, variabel Jumlah PKP memperoleh nilai signifikansi 0,082, dan PDRB memperoleh nilai signifikansi 0,471 yang mana ketiga nilainya melampaui 0,05. Simpulannya riset tidak mempunyai permasalahan gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan memastikan variabel terikat tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri tiap waktu. Tidak adanya korelasi serial, di mana estimasi variabel terikat saat ini tidak ditentukan oleh perilaku data pada observasi periode sebelumnya atau sesudahnya. Prosedur uji dilakukan dengan *Durbin Watson*. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW lebih besar dari dua dan lebih kecil dari $4 - du$. Hasil pengujian autokorelasi disajikan dalam tabel 7.

Berdasarkan pada tabel dapat dilihat hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson

sebesar 1,744 dengan nilai sedangkan nilai dU (dilihat dari tabel Durbin Watson) sebesar 1,6589. Nilai dL sebesar 1,3384 dan nilai $4 - dU$ sebesar 2,3411. Nilai Durbin Watson berada direntang dU dan $4 - dU$ yaitu $1,6589 < 1,744 < 2,3411$. Sehingga disimpulkan hasil riset tidak mempunyai masalah gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang berfungsi menentukan besaran kontribusi pengaruh variabel bebas Inflasi, Jumlah PKP, dan PDRB terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan PPN (Y). Hasil pengujian analisis regresi linear berganda disajikan dalam tabel dan penjelasan berikut ini:

- Nilai konstanta sebesar 2,413. Hal ini berarti jika semua variabel independen (variabel Inflasi, Jumlah PKP, dan PDRB) bernilai 0, maka variabel dependen (Penerimaan PPN) bernilai 2,413.
- Nilai koefisien regresi variabel Inflasi sebesar 0,015. Hal ini berarti jika variabel Inflasi bernilai tetap dan mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel Penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar 0,015. Kesimpulannya, jika Inflasi naik maka Penerimaan PPN juga akan naik.
- Nilai koefisien regresi variabel Jumlah PKP sebesar 0,753. Hal ini berarti jika variabel Jumlah PKP bernilai tetap dan mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel Penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar 0,753. Kesimpulannya, jika Jumlah PKP naik maka Penerimaan PPN juga akan naik.
- Nilai koefisien regresi variabel PDRB sebesar 0,425. Hal ini berarti jika variabel PDRB bernilai tetap dan mengalami peningkatan 1 satuan maka variabel Penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar 0,425. Kesimpulannya, jika PDRB naik maka Penerimaan PPN juga akan naik.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b			
Model	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.895 ^a	0,33736	1,744

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		
		B	Std. Error	
1	(Constant)	2,413		0,516
	INFLASI	0,015		0,086
	JUMLAH PKP	0,753		0,122
	PDRB	0,425		0,149

Sumber : Data diolah (2026)

Uji Hipotesis**Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengidentifikasi dengan parsial tiap variabel terikat berdampak signifikan kepada variabel terikat. Jika hasilnya signifikan, maka penolakan H0 serta penerimaan

H1. Jika hasilnya tidak signifikan, maka penerimaan H0 serta penolakan H1. Variabel berpengaruh dengan parsial serta signifikan jika signifikansi lebih kecil dari 0.05. Hasil pengujian parsial (Uji t) disajikan dalam tabel dan penjelasan berikut ini:

Tabel 9. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	4.674	0.000
	INFLASI	0.179	0.859
	JUMLAH PKP	6.160	0.000
	PDRB	2.850	0.007

Sumber : Data diolah (2026)

Berdasarkan pada tabel dapat dilihat hasil uji untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

Inflasi terhadap Penerimaan PPN

Variabel Inflasi menunjukkan nilai t hitung yakni 0,179, lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,028. Selain itu, hasil juga menunjukkan nilai signifikansi yakni 0,859 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05. Temuan ini mengarahkan pada sebuah konklusi bahwa penelitian menolak H1 yang menyatakan variabel Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN

Jumlah PKP menghasilkan t hitung yakni 6,160 yang lebih besar dari 2,028 (t tabel) dan nilai

signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengarahkan pada sebuah konklusi bahwa penelitian menerima H2 yang menyatakan variabel Jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

PDRB terhadap Penerimaan PPN

PDRB menunjukkan nilai t hitung yakni 2,850 yang lebih besar 2,028 (t tabel). Hasil memperlihatkan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengarahkan pada sebuah konklusi bahwa penelitian menerima H3 yang menyatakan variabel Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau Uji simultan digunakan menilai validitas statistik model regresi secara kolektif. Tujuannya guna mengonfirmasi apakah jajaran variabel bebas tersebut secara serempak berkontribusi secara bermakna terhadap variabel terikat, sehingga model dikatakan sesuai. Jika hasilnya signifikan, maka

penolakan H0 serta penerimaan H1. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dikatakan variabel berpengaruh secara simultan dan signifikan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Hasil pengujian simultan (Uji F) disajikan dalam tabel dan penjelasan berikut ini:

Tabel 9. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
1 Regression	46.898	.000 ^b
Residual		
Total		

Sumber : Data diolah (2026)

Berdasarkan pada tabel, dapat dilihat hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 46,898 dan nilai F tabel sebesar 2,84. Selain itu, hasil juga menunjukkan nilai signifikansi yakni 0,00 yang lebih besar dari 0,05. Temuan menjelaskan sebuah konklusi bahwa penelitian menerima H4 yang menyatakan variabel Inflasi, Jumlah PKP, dan PDRB dengan simultan berpengaruh kepada penerimaan PPN.

Uji Dominan

Uji dominan adalah metode dalam analisis regresi yang berfungsi mengidentifikasi variabel tidak terikat memegang peranan dominan kepada variabel terikat. Variabel bebas dianggap dominan jika ia memiliki nilai *Standardized Coefficient Beta* (β) tertinggi dibandingkan semua variabel bebas lainnya dalam model regresi. Nilai Koefisien Beta Standar ini memungkinkan perbandingan pengaruh antar variabel bebas karena telah disamakan skalanya. Adapun hasil pengujian dominan disajikan dalam tabel dan penjelasan berikut ini:

Tabel 10. Uji Dominan

Coefficients ^a	
Model	Standardized Coefficients Beta
1 (Constant)	

INFLASI	0.014
JUMLAH PKP	0.655
PDRB	0.305

Sumber : Data diolah (2026)

Berdasarkan pada tabel, dapat dilihat nilai koefisien beta standar variabel Inflasi sebesar 0,014, variabel Jumlah PKP sebesar 0,655 dan variabel PDRB sebesar 0,305. Nilai koefisien beta standar variabel Jumlah PKP menunjukkan nilai tertinggi, jauh melampaui nilai koefisien beta variabel Inflasi dan variabel PDRB. Temuan ini mengarahkan pada sebuah konklusi sesuai dengan hipotesis 5 (H5) bahwa variabel Jumlah PKP merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi Penerimaan PPN, di mana setiap perubahan pada Jumlah PKP akan memberikan dampak yang paling signifikan dibandingkan dengan perubahan pada variabel lainnya.

Pembahasan

Pengaruh Inflasi Secara Parsial Terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian parsial memperlihatkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan kepada Penerimaan PPN, memperlihatkan nilai t-hitung 0,179 lebih kecil dari 2,028 (t-tabel serta nilai signifikansi 0,859 lebih besar 0,05. Merujuk pada perolehan nilai tersebut, hipotesis 1 (H1)

mengenai pengaruh parsial Inflasi terhadap Penerimaan PPN dinyatakan tidak diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Inflasi terbukti tidak memberikan dampak signifikan dalam capaian Penerimaan PPN. Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti: Pertama, inflasi di daerah wilayah Sulselbartra cenderung stabil sehingga tidak mempengaruhi Penerimaan PPN secara signifikan. Kedua, meskipun inflasi mencerminkan kenaikan harga secara umum, PPN sebagai pajak konsumsi akhir sangat bergantung pada volume atau kuantitas konsumsi riil masyarakat. Kenaikan harga akibat inflasi yang tidak diiringi dengan peningkatan daya beli dan pendapatan riil masyarakat yang signifikan justru dapat menggerus daya beli, sehingga masyarakat cenderung mengurangi volume pembelian beragam produk dan layanan yang dikenai PPN. Penurunan kuantitas transaksi ini pada akhirnya mengimbangi efek kenaikan harga pada basis pengenaan pajak, menyebabkan total penerimaan PPN tidak bergerak secara signifikan mengikuti laju inflasi. Temuan dalam studi ini sejalan dengan hasil observasi terdahulu oleh (Junianto, Harimurti, & Suharno, 2020; Niamiyah, Andriyani Budiman, & Nur Hidayanti, 2024; Sinambela & Rahmawati, 2019).

Pengaruh Jumlah PKP Secara Parsial Terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian dengan parsial menunjukkan Jumlah PKP berpengaruh signifikan serta positif kepada Penerimaan PPN. Nilai t-hitung yakni 6,160 lebih besar dari nilai 2,028 (t-tabel) serta nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Merujuk pada perolehan nilai tersebut, hipotesis 2 (H2) mengenai pengaruh parsial Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN dinyatakan diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat bukti kuat bahwa populasi PKP menjadi determinan utama yang memengaruhi efektivitas pemungutan PPN di wilayah tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah PKP, semakin besar potensi peningkatan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini sesuai dengan literatur perpajakan, di mana peningkatan basis pajak

sejalan meningkatnya penerimaan pajak. Peningkatan jumlah PKP tidak hanya memperluas cakupan subjek pajak, tetapi juga secara langsung meningkatkan jumlah transaksi yang dikenai PPN, karena setiap PKP mempunyai kewajiban memungut, menyetor, serta melaporkan PPN dari setiap transaksi barang maupun jasa kena pajak. Pertambahan PKP secara langsung menambah saluran pengumpulan PPN, yang pada akhirnya memperbesar total penerimaan PPN secara agregat. Lebih dari itu, peningkatan jumlah PKP juga dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi; semakin banyak bisnis yang berkembang dan memenuhi syarat untuk menjadi PKP, semakin tinggi pula aktivitas ekonomi yang terjadi, yang secara alami meningkatkan volume transaksi barang dan jasa yang menjadi objek PPN. Dengan demikian, hubungan antara jumlah PKP dan penerimaan PPN tidak hanya sekadar penambahan subjek pajak, tetapi juga cerminan dari dinamika ekonomi yang lebih luas. Temuan dalam studi ini sejalan dengan hasil observasi terdahulu oleh (Renata et al., 2016).

Pengaruh PDRB Secara Parsial Terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan PDRB berpengaruh signifikan serta positif kepada Penerimaan PPN. Nilai t-hitung yakni 2,850 lebih besar dari nilai 1,688 (t-tabel), dan nilai signifikansi 0,007 memenuhi kriteria lebih kecil dari 0,05. Merujuk pada perolehan nilai tersebut, hipotesis 3 (H3) mengenai pengaruh parsial PDRB terhadap Penerimaan PPN dinyatakan tidak diterima.

Temuan ini mengindikasikan PDRB mempunyai pengaruh signifikan kepada Penerimaan PPN. PDRB pada hakikatnya merupakan cerminan dari akumulasi nilai ekonomi yang bersumber dari semua sektor produksi di suatu daerah. Dalam konteks wilayah ini, hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDRB yang terjadi didominasi oleh sektor-sektor strategis seperti transportasi, perdagangan besar, dan industri kebutuhan rumah tangga. Peningkatan aktivitas tersebut mendorong arus investasi dan proyek-proyek infrastruktur regional, serta memperluas volume transaksi bisnis antar pelaku usaha yang

kemudian memicu kenaikan pendapatan sekaligus kapasitas daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli inilah yang kemudian diwujudkan dalam lonjakan konsumsi akhir barang dan jasa, yang merupakan basis utama pengenaan PPN. Oleh karena itu, hubungan positif antara PDRB dan penerimaan PPN memperkuat argumen bahwa ekonomi suatu daerah adalah faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak tidak langsung, karena PPN secara inheren terikat pada setiap siklus transaksi ekonomi. Temuan dalam studi ini sejalan dengan hasil observasi terdahulu oleh (Marlina, 2021; Pahala & Muslih, 2020; Rizqi & Ekowati, 2022).

Pengaruh Inflasi, Jumlah PKP, dan PDRB Secara Simultan Terhadap Penerimaan PPN

Temuan dari pengujian simultan mengonfirmasi bahwa jajaran variabel tidak terikat berupa Inflasi, Jumlah PKP, dan PDRB terbukti memperlihatkan dampak yang signifikan pada capaian Penerimaan PPN. Terlihat nilai F-hitung yakni 41,896 lebih besar dari 2,84 (F-tabel), serta nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Merujuk pada perolehan nilai tersebut, hipotesis 4 (H4) mengenai pengaruh simultan Inflasi, Jumlah PKP, dan PDRB terhadap Penerimaan PPN dinyatakan diterima. Secara lebih rinci, temuan ini berarti bahwa ketiga faktor tersebut Inflasi, Jumlah PKP, dan PDRB memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam menjelaskan naik turunnya Penerimaan PPN. Faktor utama yang mendorong signifikansi simultan ini adalah kekuatan gabungan dari faktor administratif dan faktor makroekonomi yang vital, yaitu Jumlah PKP dan PDRB. Meskipun dengan parsial Inflasi tidak signifikan, pengaruh yang sangat kuat dan dominan dari Jumlah PKP sebagai basis pemungut PPN, ditambah dengan signifikansi PDRB sebagai indikator aktivitas ekonomi riil, berhasil menopang validitas model secara keseluruhan. Hal ini menyiratkan bahwa mekanisme PPN di wilayah Sulselbartra berfungsi dengan baik, di mana perluasan jumlah entitas pemungut (PKP) dan peningkatan output ekonomi regional (PDRB) menjadi penentu utama peningkatan penerimaan pajak konsumsi. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk memahami dan

memprediksi Penerimaan PPN, perlu dipertimbangkan gambaran yang lebih luas tidak hanya dari sisi makroekonomi melainkan dari sisi perpajakan juga, dimana inte raksi antara pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB, basis pajak yang dilihat dari Jumlah PKP, dan kondisi harga yang dilihat dari Inflasi secara kolektif menentukan hasil akhir. Kebijakan fiskal atau strategi perpajakan yang efektif harus memperhitungkan sinergi dari ketiga variabel ini, bukan hanya melihatnya secara terpisah. Ini memberikan penjelasan bahwa Penerimaan PPN bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa pendorong ekonomi yang saling terkait. Temuan dalam studi ini sejalan dengan hasil observasi terdahulu oleh (Pahala & Muslih, 2020; Rizqi & Ekowati, 2022).

Pengaruh Jumlah PKP Secara Dominan Terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian secara dominan menunjukkan bahwa Jumlah PKP merupakan faktor mempunyai berpengaruh paling dominan kepada Penerimaan PPN. Dominansi ini terbukti dari nilai Koefisien Beta Standar Jumlah PKP yang paling tinggi yakni sebesar 0,655 dibandingkan dengan Inflasi yang hanya sebesar 0,014 dan PDRB yang hanya sebesar 0,305. Merujuk pada perolehan nilai tersebut, hipotesis 5 (H5) mengenai pengaruh dominan Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN dinyatakan diterima. Pengaruh dominan ini disebabkan oleh sifat PPN sebagai pajak konsumsi yang pemungutannya diamanatkan secara langsung kepada PKP. Secara esensial, PKP merupakan basis utama dalam rantai pemungutan PPN. Semakin banyak entitas yang terdaftar dan menjalankan kewajiban sebagai PKP, maka semakin luas cakupan objek pajak PPN yang dapat dipungut oleh negara. Dengan demikian, peningkatan Jumlah PKP mencerminkan upaya ekstensifikasi perpajakan yang paling efektif, karena secara langsung memberikan dampak struktural dan kontribusi terbesar terhadap total Penerimaan PPN, berbeda dengan Inflasi atau PDRB yang pengaruhnya bersifat lebih tidak langsung dan makro. Dominansi variabel ini juga membuktikan bahwa faktor yang berfokus pada perluasan subjek pajak merupakan penentu utama stabilitas dan pertumbuhan penerimaan

PPN, bahkan melebihi variabel makro ekonomi lainnya. Temuan dalam studi ini sejalan dengan hasil observasi terdahulu oleh (Renata et al., 2016; Sinambela & Rahmawati, 2019; Yulianingtyas, 2018)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPN. Hal tersebut dikarenakan model penelitian ini telah terbukti valid dalam menjelaskan variasi penerimaan pajak atas konsumsi ini. Namun, signifikansi tersebut sangat didorong oleh kinerja dua variabel, yaitu Jumlah PKP dan PDRB. Sehingga implikasinya adalah Kanwil DJP tidak dapat menggunakan satu faktor saja dalam mencapai target PPN, melainkan menyelaraskan faktor lain seperti administratif (PKP) dan faktor ekonomi riil (PDRB). Jumlah PKP dan PDRB dengan parsial berpengaruh positif serta signifikan kepada Penerimaan PPN disebabkan Jumlah PKP memperluas basis pajak dan PDRB adalah cerminan dari aktivitas ekonomi riil di mana peningkatan PDRB memicu peningkatan volume konsumsi yang menjadi basis transaksi PPN. Implikasinya, kebijakan harus memprioritaskan ekstensifikasi pajak dan PDRB harus dijadikan indikator utama dalam menyusun proyeksi target PPN, memastikan target selaras dengan kapasitas pertumbuhan ekonomi regional.

Inflasi tidak berpengaruh parsial signifikan kepada Penerimaan PPN. Hal tersebut dikarenakan PPN merupakan pajak tidak langsung dengan mekanisme kredit pajak. Kenaikan inflasi yang menyebabkan Pajak Keluaran naik, seringkali diimbangi oleh kenaikan Pajak Masukan akibat biaya input yang juga terkena inflasi. Tingginya kenaikan bisa menggerus daya beli dan mengurangi volume transaksi, sehingga efek kenaikan harga terhadap PPN menjadi teredam. Implikasinya, Kanwil DJP tidak dapat menjadikan laju inflasi sebagai acuan utama guna mendorong Penerimaan PPN. Besarnya jumlah PKP mempunyai signifikansi yang paling dominan terhadap capaian Penerimaan PPN jika dikomparasikan dengan PDRB dan Inflasi

terlihat dari nilai koefisien beta standar tertinggi yang dimiliki oleh Jumlah PKP. Hal ini dikarenakan PKP merupakan faktor yang secara langsung dapat memperluas basis pemungutan pajak. Semakin banyak entitas yang wajib memungut PPN, semakin besar pula potensi Penerimaan PPN yang bisa didapatkan. Implikasinya, Jumlah PKP harus menjadi prioritas kebijakan utama dan kunci keberhasilan Kanwil DJP Sulselbartra dalam mengamankan dan meningkatkan target penerimaan PPN.

Saran untuk Kanwil DJP Sulselbartra, diharapkan dapat fokus pada ekstensifikasi Wajib Pajak atau perluasan basis Wajib Pajak, mengingat Jumlah PKP merupakan faktor paling dominan. Selain itu, Kanwil DJP Sulselbartra perlu memantau tren PDRB secara berkala sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan dan penagihan PPN, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat.

Saran untuk Bank Indonesia (BI) diharapkan untuk terus memperkuat kebijakan moneter yang fokus pada stabilitas harga guna mengendalikan laju Inflasi. Meskipun Jumlah PKP terbukti dominan, Inflasi tinggi mengikis daya beli riil masyarakat, pada gilirannya dapat menekan volume transaksi konsumsi dan berpotensi menurunkan basis PPN riil. Stabilitas Inflasi yang diciptakan oleh BI akan mendukung pertumbuhan transaksi ekonomi yang sehat, yang merupakan prasyarat penting bagi optimalisasi Penerimaan PPN. Bank Indonesia (BI) juga perlu bersinergi dengan otoritas fiskal (DJP) untuk mengkaji lebih lanjut dampak Inflasi terhadap *cash flow* dan tingkat kepatuhan setoran PPN oleh PKP.

Saran untuk Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk menyertakan variabel independen lebih lanjut yang relevan, seperti derajat ketaatan wajib pajak serta tarif pajak guna memperoleh pemahaman komprehensif berkaitan sejumlah faktor menentukan Penerimaan PPN. Peneliti selanjutnya dapat pula mendayagunakan periode penelitian yang lebih panjang atau data yang lebih terkini untuk menguji konsistensi hasil penelitian ini. Selain itu, disarankan untuk melibatkan alternatif metode analisis, seperti regresi data panel atau regresi dengan variabel

moderasi, untuk memperkaya temuan penelitian dan mengatasi keterbatasan model regresi linear berganda.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, N., Yahya, A., Fuadi, A., & Khasanah, A. N. (2023). Dampak Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Faktor Makro Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cikarang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 8(02), 89–98. <https://doi.org/10.37366/akubis.v8i02.1101>
- Boediono. (2015). *Ekonomi Makro*. BPFE.
- Diansyah, U., Fadhliliah, A., Rahmalia, & Fatriansyah, A. (2023). *The Effect Of Restaurant And Coffe Shop Tax (Pad) According To Islamic Perspective (Study in. 02(2)*, 1–10.
- Dunakhir, S., & Idrus, M. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Perdagangan Eceran di Indonesia Selama Tahun Pertama Masa Pandemi Covid 19. 2016*, 1778–1785.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1–29.
- Ghozali, I. (2021). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS Edisi 9*. Badan Penerbit Undip.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Prenada Media.
- Hafidz, M., Rizah Fahlevi, M., & Alfa Centauri, S. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 17–26.
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah Ii. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311–321. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4439>
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Palgrave Macmillan.
- Mailindra, W., Harahap, S. B., & Sujadi, E. (2022). *Ekonomi Moneter*. Adab.
- Mardiasmo. (2023). *PERPAJAKAN*. Andi.
- Marlina, L. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (Pkp) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kota Malang. Universitas Brawijaya.
- Munandar, A., & Wardoyo, R. (2015). Fuzzy-Klassen Model for Development Disparities Analysis based on Gross Regional Domestic Product Sector of a Region. *International Journal of Computer Applications*, 123(7), 17–22. <https://doi.org/10.5120/ijca2015905389>
- Niamiyah, A., Budiman, A., & Hidayanti, A. (2024). Pengaruh SPT Masa PPN, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kudus Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(2), 86–101.
- Oktaviani, W., Syafitri, L., & Munandar, A. (2024). Pengaruh Inflasi Dan Pdb Terhadap Penerimaan Ppn Di Indonesia. *Jurnal EK & BI*, 7(1), 169–183. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1377>
- Pahala, A. A., & Muslih, M. (2020). Pengaruh Pdrb, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015 - 2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3083–3090.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Rizqi, M., & Ekowati, L. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 2015-2021. *Prosiding SNAM PNJ*, 3, 1–12.

- Salim, A., & Fadilla. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–28. www.bps.go.id.
- Sapridawati, Y., Indrawati, N., Sofyan, A., & Zirman. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *The Journal Civitation Tax Center*, 2(1), 2722–5437.
- Salsabilah, D. (2024). Peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Meningkatkan Penerimaan Negara dan Stabilitas Ekonomi. Retrieved January 15, 2025, from https://unair.ac.id/post_fetcher/fakultas-vokasi-peran-pajak-pertambahan-nilai-ppn-dalam-meningkatkan-penerimaan-negara-dan-stabilitas-ekonomi/
- Saparuddin, M. (2015). Dampak Industri Kecil dan Menengah pada Kesempatan Kerja dan Pendapatan per Kapita. *Trikonomika*, 10(2), 85–94.
- Setyawan, S. (2021). PERPAJAKAN: Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah. UMMPress.
- Sukardji, U. (2015). Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, T. W. D. (2015). Perpajakan Indonesia, Mekanisme Dan Perhitungan edisi Revisi. In *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Andi.
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Ekuivalensi*, 5(1), 83–97.
- Soesana, A., Subakti, H., Salamun, S., Tasrim, I. W., Karwanto, K., Falani, I., Bukidz, D. P., & Pasaribu, A. N. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardji, U. (2015). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai*. Raja Grafindo Persada.
- Tjahyono, M. B. (2019). Kemandirian yang Dicitakan. Retrieved January 14, 2025, from <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/ke-mandirian-yang-dicitakan>
- Wijayanti, A. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: In *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Wijayanti, W. K., & Budi N, A. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Media Ekonomi*, 18(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/me.v18i1.53>
- Widjajanto, T., & Agus, I. (2020). Analisis Pengaruh Investasi dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. *Sosio E-Kons*, 12(1), 89. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i1.5846>
- Wulandari, D. S., & Yulianti, V. (2023). Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. *AKUISISI: Jurnal Akuntansi*, 19(01), 66–84.
- Yulianingtyas, L. D. (2018). *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)* (Universtias Brawijaya). Universtias Brawijaya. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162352>